



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDIENSI TIMJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR-RI
DENGAN
HIPERKES, BP2TKI, DAN BLK PROPINSI JAWA TIMUR
RABU, 9 APRIL 2008**

I. PENDAHULUAN

Perwakilan 3 Satuan Kerja dari UPT Depnakertrans RI, Propinsi Jawa Timur masing-masing dari Hiperkes, BP2TKI, dan BLK yang diwakili oleh 17 pejabatnya, serta didampingi Kepala Dinas Nakertrans Propinsi Jawa Timur datang ke Komisi IX DPR-RI untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai belum adanya kepastian hukum serta kejelasan status ketiga satuan kerja tersebut pada era otonomi daerah saat ini. Karena menurut mereka hal ini sangat berhubungan erat dengan penentuan kebijakan program dan anggaran bagi ketiga satuan kerja dimaksud sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar.

Kedatangan mereka diterima oleh Anggota Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI, mewakili Pimpinan Komisi IX DPR-RI, Sbb. :

1. Sonny Soemarsono (F.PDIP)
2. L. Soepomo Sintoewasito (F.PDIP)
3. Drs. Arisman Zagoto (F.PDS)
4. H. Husairi Abdi, Lc (F.PP)
5. Hasanudin Said (F.PD)

Pertemuan dipimpin Sonny Soemarsono (Ketua Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI), berlangsung pukul 14.00 s.d 15.15 Wib di Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Sebagai bahan masukan Komisi IX DPR-RI, para wakil dari 3 satuan kerja antara lain menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan dan program-programnya, antara lain sbb. :

1. Dalam menentukan kebijakannya masih terjadi tarik menarik diantara 3 satuan kerja akibat tidak jelasnya status hukum yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan penganggaran.

2. Pada saat ini kondisi BLK yang sudah berjalan lebih dari 8 tahun tidak mengalami perkembangan yang berarti, fasilitas yang ada tidak maksimal, perlu revitalisasi dan dukungan anggaran yang memadai.
3. Keberadaan Instruktur saat ini jumlahnya semakin menurun, begitu pula kualitasnya sehingga diperlukan regenerasi karena saat ini para instruktur tidak memiliki jenjang karier yang jelas.
4. Keberadaan BLK di Propinsi Jawa Timur diharapkan dapat diserahkan secara mutlak kepada daerah, dan mengenai masalah dana agar bisa dilakukan sharing oleh Pusat dan Daerah.
5. Melalui Komisi IX DPR-RI diharapkan dapat menjembatani mengenai kejelasan status hukum terhadap ketiga Satuan Kerja ~~DA~~ dilingkungan Depnakertrans RI, Propinsi Jawa Timur.

III. TANGGAPAN TIMJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR-RI

Setelah mendengarkan aspirasi dari masing-masing Satuan Kerja, Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI memberikan tanggapan sbb. :

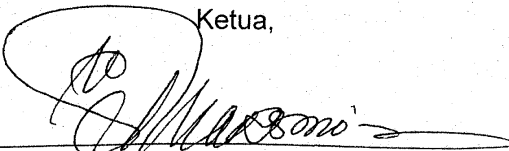
1. Aspirasi yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Pimpinan Komisi IX DPR-RI untuk dijadikan bahan Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri lainnya yang terkait, sehingga dapat segera dilahirkan kepastian hukum dan kejelasan status bagi ketiga satuan kerja dilingkungan Depnakertrans yang ada di Propinsi Jawa Timur tersebut.
2. Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM pada ketiga satuan kerja (Hiperkes, BP2TKI, dan BLK) di Propinsi Jawa Timur.
3. Anggota Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur akan melihat secara langsung kondisi dilapangan pada Masa Reses Persidangan III.

Pertemuan diakhiri pukul 15.15 Wib.

Jakarta, 9 April 2008

Timja Nakertrans Komisi IX DPR-RI,

Ketua,



SONNY SOEMARSONO